



Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Defisit Anggaran (Tinjauan Literatur)

The Effectiveness of Fiscal Policy in Addressing Budget Deficits (Literature Review)

**Tamara Gresalia Silaban¹, Daniel Steven Fransiskus Manao², Rut Anggreni Siburian³,
Chairunnisa Zakina Adibra⁴, Akmal Huda Nasution⁵**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: tamarasbn08@gmail.com¹, danielstevnfsm@gmail.com², rutsiburian22@gmail.com³,
nisazakina@unimed.ac.id⁴, akmalhudanst@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 11-04-2026

Revised : 13-04-2026

Accepted : 15-04-2026

Published : 17-04-2026

Abstract

Fiscal policy is a primary instrument used by the government to manage the economy, particularly in addressing budget deficits that frequently challenge public finances in many countries, including Indonesia. This article is a literature review synthesizing findings from various academic studies on fiscal policy, state budget management, budget efficiency, and Islamic economic perspectives. The findings indicate that Indonesia implements an expansionary fiscal policy in which state expenditures exceed revenues, resulting in budget deficits financed through government securities and foreign loans. Fiscal policy has proven effective in stimulating economic growth, controlling inflation, and improving income distribution; however, its effectiveness depends heavily on planning quality, performance-based budgeting systems, transparency, and bureaucratic accountability. From an Islamic economics perspective, alternative state revenue sources through zakat, infaq, sadaqah, and waqf hold significant potential as supplementary fiscal instruments. This study recommends institutional reforms, strengthening of zero-based budgeting, and synergy between fiscal and monetary policies as key strategies to achieve sustainable long-term fiscal balance.

Keywords: Fiscal Policy, Budget Deficit, Budget Efficiency

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian, khususnya dalam mengatasi defisit anggaran yang kerap menjadi tantangan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang merangkum dan mensintesis temuan dari berbagai kajian akademis mengenai kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, efisiensi anggaran, serta perspektif ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang menyebabkan pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan, sehingga menghasilkan defisit anggaran yang ditutup melalui penerbitan surat utang dan pinjaman luar negeri. Kebijakan fiskal terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperbaiki distribusi pendapatan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan, sistem penganggaran berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat alternatif sumber pendapatan negara melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal tambahan. Penelitian ini menyarankan reformasi kelembagaan, penguatan zero-based budgeting, serta sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sebagai kunci dalam mencapai keseimbangan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Defisit Anggaran, Efisiensi Anggaran



PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Secara umum, kebijakan fiskal didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara guna mempengaruhi jalannya perekonomian (Irawan, 2023; Rahayu, 2014). Instrumen utama kebijakan fiskal mencakup pajak, pengeluaran pemerintah, dan transfer pemerintah, yang semuanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan dinamika ekonomi yang kompleks, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan fiskal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam periode 2018-2022, pengeluaran negara secara konsisten melebihi pendapatan, yang merupakan ciri khas kebijakan fiskal ekspansif (Usman & Wartoyo, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh tekanan global seperti pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah meningkatkan belanja secara signifikan untuk menyelamatkan perekonomian.

Defisit anggaran yang terus berlanjut menuntut pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, baik melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman luar negeri. Utang publik Indonesia pada akhir 2020 mencapai Rp5.910 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,13 persen, masih dalam batas aman namun memerlukan perhatian serius (Syadza et al., 2021). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: seberapa efektif kebijakan fiskal yang diterapkan dalam mengatasi defisit anggaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat?

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan fiskal memiliki dimensi yang lebih luas. Khalifah Umar bin Khattab, sebagai salah satu pemimpin Islam paling berpengaruh, menerapkan sistem anggaran berimbang melalui lembaga Baitul Maal dengan instrumen zakat, ushr, jizyah, kharaj, dan khums (Handayani & Huda, 2023). Relevansi sistem fiskal Islam ini terhadap APBN modern Indonesia menjadi kajian yang menarik seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis berbagai kajian literatur mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran, mencakup aspek pengelolaan APBN Indonesia, kebijakan fiskal pada masa krisis, efisiensi anggaran, serta perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data berasal dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi pemerintah, dan artikel penelitian yang relevan dengan topik kebijakan fiskal dan defisit anggaran. Jurnal-jurnal yang dikaji mencakup: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Peradaban Journal of Economic and Business, Journal of Economics Development Research, Jurnal Acitya Ardana, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, dan Journal of Economics Assets and Evaluation.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan benang merah dari berbagai literatur yang dikaji. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Hasil sintesis



disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran dari berbagai perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Indonesia dan Pengelolaan APBN

Berdasarkan kajian literatur, kebijakan fiskal Indonesia secara konsisten menerapkan pola ekspansif, yaitu pengeluaran negara selalu melebihi pendapatan. Usman dan Wartoyo (2024) menemukan bahwa dalam periode 2018-2022, realisasi belanja negara selalu lebih besar dari pendapatan negara, dengan defisit yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, defisit APBN mencapai 6,09 persen terhadap PDB sebagai dampak dari pandemi COVID-19, meski masih di bawah batas ketentuan Undang-Undang sebesar 60 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara dalam APBN bersumber dari tiga komponen utama: penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pada APBN 2023, target penerimaan perpajakan mencapai Rp2.016,9 triliun, PNBP Rp426,3 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun dengan total pendapatan negara Rp2.443,6 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun, menghasilkan defisit anggaran Rp598,2 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB (Handayani & Huda, 2023).

Untuk mengatasi defisit tersebut, pemerintah menempuh kebijakan pembiayaan melalui penerbitan SBN dan pinjaman. Usman dan Wartoyo (2024) mengidentifikasi bahwa Indonesia juga mulai menerapkan zero-based budgeting dan mendorong ekspor komoditas hilir bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan pendapatan negara. Inovasi ini penting karena penerimaan pajak masih mendominasi lebih dari 65 persen total pendapatan negara.

Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sari et al. (2024) menyatakan bahwa pajak, belanja barang, dan subsidi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, sementara utang luar negeri dan belanja pegawai berkorelasi negatif. Temuan ini mengindikasikan pentingnya komposisi belanja dalam menentukan efektivitas fiskal.

Dalam kerangka teori IS-LM, kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak akan menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan pendapatan nasional melalui efek pengganda (multiplier effect). Syadza et al. (2021) menjelaskan bahwa kenaikan belanja pemerintah akan mendorong kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan belanja itu sendiri karena mekanisme pengganda ini.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga paket stimulus fiskal: Rp8,5 triliun pada Februari 2020 untuk sektor pariwisata, Rp22,5 triliun pada Maret 2020 untuk sektor industri, dan Rp405,1 triliun pada akhir Maret 2020 untuk kebijakan kesehatan dan perlindungan sosial (Silalahi & Ginting, 2020). Hasilnya, meskipun ekonomi mengalami kontraksi 5,32 persen pada kuartal II-2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.

Pada tingkat yang lebih agregat, ekonomi Indonesia yang pada 2021 hanya tumbuh 3,70 persen berhasil tumbuh 5,31 persen pada 2022 berkat kebijakan fiskal ekspansif yang berkelanjutan



(Usman & Wartoyo, 2024). Penelitian Blanchard dan Perroti (dalam Ayyub et al., 2023) mengkonfirmasi bahwa stimulus fiskal sebesar 1 persen PDB terbukti meningkatkan PDB hampir 1 hingga 3 persen saat efek stimulus mencapai puncaknya.

Kebijakan Defisit dan Utang Negara

Defisit anggaran merupakan konsekuensi logis dari kebijakan fiskal ekspansif. Ayyub et al. (2023) dalam tinjauan literturnya menemukan bahwa defisit fiskal sering kali dihubungkan dengan instrumen fiskal lainnya, yaitu utang publik, dengan preferensi penggunaan utang karena dinilai efisien dalam konteks darurat. Utang memiliki dampak positif dalam jangka pendek karena dapat mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang berdampak pada pengurangan modal dan pendapatan negara.

Penelitian yang dirangkum Ayyub et al. (2023) menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mengenai dampak utang terhadap perekonomian. Di satu sisi, utang publik dapat dengan cepat menyelesaikan masalah ekonomi pada masa resesi. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, utang akan memperburuk situasi ekonomi. Beberapa prasyarat keberhasilan pengelolaan utang meliputi akuntabilitas yang baik, stabilitas kondisi politik, dan bebas dari korupsi.

Salman dan Iqbal (2025) menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban utang dan memperbaiki struktur APBN. Data menunjukkan bahwa pada 2022, terjadi penurunan signifikan dalam pos belanja barang, sementara belanja modal mengalami peningkatan. Kebijakan ini tidak hanya menekan defisit fiskal, tetapi juga memperluas ruang fiskal untuk mendukung program pemulihan ekonomi.

Efisiensi Anggaran sebagai Solusi Defisit

Efisiensi anggaran merupakan konsep utama dalam ekonomi sektor publik yang mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Salman dan Iqbal (2025) mengidentifikasi dua aspek utama efisiensi dalam keuangan publik: efisiensi alokatif (alokasi sumber daya ke sektor dengan manfaat sosial terbesar) dan efisiensi teknis (pelaksanaan kegiatan dengan input seminimal mungkin untuk output tertentu).

Implementasi efisiensi anggaran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan pendekatan incremental budgeting berbasis tren historis tanpa mempertimbangkan efektivitas program. Salman dan Iqbal (2025) mencatat bahwa reformasi anggaran di Indonesia memerlukan waktu dan proses panjang karena resistensi birokrasi terhadap sistem berbasis kinerja.

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi beberapa prioritas fiskal dalam pengelolaan APBN 2022, termasuk: melanjutkan pengendalian COVID-19, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, fokus pada peningkatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat desentralisasi fiskal, dan melanjutkan reformasi anggaran melalui zero-based budgeting (Usman & Wartoyo, 2024). Penerapan zero-based budgeting diharapkan dapat mendorong belanja yang lebih efisien dengan mengevaluasi setiap program dari nol berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya.

Transparansi dan evaluasi menjadi kunci dalam menjamin efektivitas kebijakan efisiensi anggaran. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang baik, pemotongan anggaran dapat menjadi



kontraproduktif. Syadza et al. (2021) merekomendasikan pengembangan dashboard anggaran yang menyediakan informasi real-time kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Krisis

Tinjauan literatur mengenai peran kebijakan fiskal dalam krisis menunjukkan bahwa terdapat dua posisi utama yang diambil pemerintah: stimulus fiskal (kebijakan ekspansif) dan penghematan (kebijakan kontraktif). Ayyub et al. (2023) menemukan bahwa stimulus fiskal merupakan respons makroekonomi yang dominan dalam pemulihan ekonomi pasca krisis, bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) secara aktif mendorong negara-negara untuk meluncurkan stimulus fiskal global dalam menangani krisis 2008.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Silalahi dan Ginting (2020) mencatat bahwa Indonesia menerapkan berbagai kebijakan fiskal dari sisi penerimaan, antara lain: pemberian insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, percepatan restitusi PPN, serta penerapan pajak digital melalui skema PMSE. Dari sisi pengeluaran, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk memprioritaskan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Irawan (2023) menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki enam tujuan utama dalam perekonomian: meningkatkan laju investasi, mendorong investasi optimal secara sosial, meningkatkan kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, menanggulangi inflasi, serta meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Pencapaian tujuan-tujuan ini memerlukan koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter.

Perspektif Ekonomi Islam: Fiskal Umar bin Khattab dan Relevansinya

Kajian mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memberikan wawasan komparatif yang berharga. Handayani dan Huda (2023) menganalisis relevansi kebijakan fiskal Khalifah Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023 dan menemukan berbagai titik kesesuaian yang signifikan.

Dari sisi penerimaan negara, instrumen fiskal zakat pada masa Umar memiliki relevansi dengan PPh dan PPN di Indonesia, kharaj (pajak tanah) relevan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ushr (bea cukai perdagangan) relevan dengan bea masuk dan bea keluar, jizyah (pajak perlindungan non-Muslim) relevan dengan visa bagi warga negara asing, dan rikazh (pajak barang tambang) relevan dengan penerimaan SDA migas dan non-migas (PNBP).

Dari sisi pengeluaran, pengeluaran untuk dakwah dan penyebaran Islam pada masa Umar relevan dengan anggaran keagamaan Indonesia, pembangunan struktur fisik relevan dengan belanja infrastruktur dan layanan publik, gaji pegawai relevan dengan belanja pegawai PNS, dana pensiun relevan dengan jaminan sosial, dan pembiayaan militer relevan dengan anggaran pertahanan dan keamanan.

Ayyub et al. (2023) menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, instrumen zakat merupakan alternatif fiskal yang memiliki keunggulan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memberikan redistribusi pendapatan yang adil, dan berfungsi sebagai alat stabilisasi



otomatis saat terjadi resesi ekonomi. Prinsip dasar pengelolaan fiskal Islam adalah bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan ketika ada penerimaan, dan praktik anggaran defisit hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu yang mendesak.

Dampak Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sari et al. (2024) menemukan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang berfokus pada perlindungan sosial, bantuan langsung tunai, dan dukungan kesehatan selama pandemi telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Silalahi dan Ginting (2020) menunjukkan bahwa efektivitas distribusi manfaat fiskal sangat bergantung pada ketepatan sasaran program. Permasalahan transparansi anggaran dan lambatnya realisasi anggaran menjadi hambatan utama. Pendataan masyarakat yang belum efisien menyebabkan masih adanya kelompok yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan sistem data dan pengawasan berbasis masyarakat menjadi kunci peningkatan efektivitas distribusi fiskal.

Dalam konteks regional, alokasi anggaran yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial di daerah tertinggal dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan kesenjangan antar wilayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis dari berbagai kajian literatur, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi defisit anggaran:

1. Kebijakan fiskal ekspansif yang diterapkan Indonesia menghasilkan defisit anggaran yang dibiayai melalui penerbitan SBN dan utang luar negeri. Meskipun utang publik masih berada dalam batas aman (di bawah 60 persen PDB), tren peningkatan utang memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal jangka panjang.
2. Kebijakan fiskal terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pengganda belanja pemerintah dan pengurangan pajak. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada kualitas komposisi belanja, dengan belanja modal dan infrastruktur memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar dibandingkan belanja operasional.
3. Efisiensi anggaran menjadi solusi kunci dalam menekan defisit tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Penerapan zero-based budgeting, penganggaran berbasis kinerja, dan penguatan sistem monitoring-evaluasi merupakan reformasi yang mendesak untuk meningkatkan produktivitas belanja negara.
4. Dalam perspektif ekonomi Islam, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan alternatif yang dapat melengkapi sistem fiskal konvensional. Relevansi sistem fiskal Khalifah Umar bin Khattab dengan APBN modern Indonesia memberikan inspirasi untuk memperkuat prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.



5. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, transparansi pengelolaan anggaran, serta ketepatan sasaran distribusi manfaat fiskal merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan kebijakan fiskal dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, M. N. A., & Pradiandy, H. (2023). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Krisis Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64-74.
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759-2772.
- Irawan, E. (2023). Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01-08.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kemenkeu.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi (Edisi ke-6)*. Jakarta: Erlangga.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Rahayu, A. S. (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salman & Ikbal, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68-72.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1-10.
- Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 156-167.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector (3rd ed.)*. New York: W.W. Norton & Company.
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Syadza, H. A., Gusnawati, W. A., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 75-82.
- Usman & Wartoyo. (2024). Analysis of Fiscal Policy in the Management of the National Budget in Indonesia. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 3(1), 55-71.